

Nama : Septi Nurmila Sari

NPM : 2253053004

Kelas : 2B

PRETEST PERTEMUAN 5

“Bagaimana revisi UU di MK mengancam Konsitusi di Indonesia ?”

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Jawab: Beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah:

- Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya keadilan dan demokrasi konstitusional di Indonesia, terlihat dari adanya keresahan dan aspirasi yang disampaikan oleh mereka mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi UU MK.
- Masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai rakyat dan memilih untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan, dalam hal ini dengan mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.
- Adanya peneliti dan koalisi masyarakat sipil yang turut memantau dan memberikan analisis kritis terhadap proses pembentukan undang-undang dan perubahan yang dilakukan dalam Revisi UU MK.
- Walaupun terdistraksi oleh isu UU Cipta Kerja, masyarakat tetap menyadari pentingnya masalah lain yang dapat mengancam demokrasi konstitusional di Indonesia, seperti Revisi UU MK.

Dalam artikel tersebut, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu:

- Minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak diindahkan oleh DPR. Hal ini menjadi tidak demokratis karena transparansi dan partisipasi publik adalah unsur penting dalam demokrasi.
- Adanya revisi UU Mahkamah Konstitusi yang bermasalah secara formil dan material. Proses pembentukan UU ini dilakukan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan urgensi di masa pandemi. Selain itu, proses pembentukan UU ini tidak mematuhi Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum karena Indonesia adalah negara hukum.
- Adanya usaha transaksi politik dengan para hakim konstitusi yang sedang menjabat saat ini, atau sebagai 'kado' bagi mereka, dengan harapan putusan-putusan yang dilahirkan nanti akan memihak DPR dan Pemerintah akibat transaksi tersebut. Hal ini mengancam independensi lembaga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bebas dari intervensi politik. Perlu dilakukan

reformasi sistem politik dan hukum yang lebih transparan, partisipatif, dan independen untuk menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia. Keterbukaan dan partisipasi publik harus dijamin dalam proses pembentukan undang-undang, dan lembaga-lembaga negara harus bebas dari intervensi politik untuk memastikan independensinya.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Jawab: Konstitusi adalah seperangkat peraturan dasar yang menentukan struktur, fungsi, dan wewenang dari pemerintahan sebuah negara. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai panduan atau landasan hukum yang mengatur cara negara dijalankan, hak dan kewajiban warga negara, serta mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- Menjaga kestabilan dan konsistensi negara: Konstitusi memberikan kerangka dasar dan aturan yang jelas bagi pemerintahan negara, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas dan konsistensi negara dalam jangka panjang.
- Mengatur pembagian kekuasaan: Konstitusi menentukan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan satu lembaga atau individu.
- Melindungi hak asasi manusia: Konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan warga negara, sehingga negara tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya.
- Memberikan legitimasi bagi pemerintahan: Konstitusi memberikan legitimasi bagi pemerintahan dan menetapkan cara pemilihan pejabat publik, sehingga dapat memastikan bahwa pemerintahan didukung oleh suara mayoritas.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara dan menentukan arah pembangunan nasional. UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan menentukan hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, UUD 1945 juga menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi landasan ideologi bagi negara Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Jawab: Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:

- Menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam melakukan tindakan korupsi. Melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara.
- Melanggar aturan dan prinsip-prinsip demokrasi, seperti membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

- Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan bertanggung jawab.

Jika seorang pejabat negara melakukan perilaku yang tidak konstitusional, maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika terbukti bersalah, pejabat negara tersebut layak mendapat hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Namun, dalam beberapa kasus, pemberian kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya atau mengubah perilakunya juga bisa menjadi pilihan yang baik untuk menghindari terjadinya tindakan serupa di masa depan. Namun demikian, keputusan akhir mengenai hukuman yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan tindakan tidak konstitusional haruslah ditentukan melalui proses yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.